



HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM CENGKERAMAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI MENUJU PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Osbin Samosir¹, Indah Novitasari²

¹Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, osbinsamosir22@gmail.com

²Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Corresponding Author: Osbin Samosir¹

Abstrak: Salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. Pemilihan umum dalam konteks Indonesia tidak seindah harapan di atas. Pengalaman pemilihan umum nasional Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019 direcoki dengan politik identitas agama yang memuakkan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan proses demokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak batin rakyat di pemilu. Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan ke kandidat yang satu dianggap didukung oleh partai politik dengan sebutan partai politik yang diridoi Allah, sementara calon presiden yang lain dikategorikan sebagai partai yang didukung oleh partai-partai yang diridhoi oleh setan atau iblis. Semua idealism demokrasi terlupakan yakni ketika prinsip-prinsip demokrasi yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemilihan umum yang terbuka dan adil, serta kebebasan pemilih menjadi kabur dan cenderung hilang. maraknya penggunaan isu politik identitas khususnya atas nama agama sangat berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia.

Kata kunci: politik identitas, demokrasi, pemilu, politisi Kristen

PENDAHULUAN

Pengantar

Sejarah Indonesia adalah sejarah politik identitas. sejarah itu sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Dalam sebuah rapat parlemen di Voolksraad tahun 1932, Ignatius Josep Kasimo dari tokoh politik Katolik sudah mendapat tuduhan sebagai antek-antek kolonialisme hanya karena agamanya dianggap bahagian dari agama yang dianut oleh kolonialisme. Sejarah terburuk politik identitas bisa disebut kegagalan Konstituante menuntaskan siding-sidangnya hamper tiga tahun (1956-1959) sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan untuk kembali menggunakan UUD 1945 sebagai UUD yang sah bagi Indonesia. Sejarah siding-sidang konstituante yang

sangat melelahkan itu adalah pertarungan antara ideology menggunakan Syariat Islam sebagai dasar Ideologi Negara sebagaimana sempat tertulis 7 (tujuh) kata dalam Sila pertama Pancasila Piagam Jakarta untuk dimuat sebagai basis penyusunan UUD baru bagi Negara Indonesia. Di lain sisi kalangan nasionalis yakni kalangan Islam moderat dan nasionalis didukung oleh kalangan non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain) menolak ide itu dengan tetap mendorong Pancasila sebagaimana dibahas dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945 menjadi dasar Negara Indonesia dan menjadi basis penyusunan UUD baru bagi Indonesia.

Kebuntuan yang berlarut-larut itu membuat Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai UUD Negara Indonesia. Sejak pengalaman yang buruk itu karena menguatnya isu-isu identitas agama untuk dimasukkan dalam politik bernegara, maka ideology atas nama agama dibungkam dengan sangat keras di masa Pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru. satu-satunya ideology yang wajib dipakai dalam seluruh urusan bernegara hanyalah ideology Pancasila, termasuk dalam ideology yang diusung oleh partai-partai politik termasuk Partai Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai hasil fusi partai-partai Islam tahun 1973. Pemerintah Orde Baru dengan sangat keras dan otoriter memaksa semua pihak harus tunduk pada kebijakan pemerintah pusat. Asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam seluruh ranah kehidupan di seluruh sudut bernegara berjalan sepanjang pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998), sebelum kemudian pemerintahan otoriter itu tumbang oleh aksi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 21 Mei 1998.

Lahirnya Era Reformasi sejak 1998 menjadi kesempatan banyak pihak untuk kembali ke cita-cita dan ideology yang selama pemerintahan Orde Baru terbungkam dengan paksa. Kebebasan masyarakat sipil berpolitik terbukti dengan lahirnya rausan partai yang dipemilu pertama nasional sangat terlihat perubahan demokrasi mencolok. Bila di masa Orde Baru peserta pemilu sejak pemilu 1977 hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta pemilu, di pemilu tahun 1999 peserta pemilu terdapat 48 partai politik, dan ratusan partai politik lain tidak lolos seleksi baik ditingkat pemerintah Kementerian Hukum dan Ham maupun di tingkat Komisi Pemilihan Umum. Euforia public sangat terlihat jelas ketika sejumlah partai walau hanya memiliki 1 (satu) kursi di parlemen tetap meloloskan wakilnya untuk duduk di parlemen. Selain itu warga Negara dengan sangat bebas mengemukakan ide dan pendapatnya termasuk ide dan gagasan atas nama agama yang semakin menguat. Perwakilan politik warga Negara yakni parlemen/DPR RI tiba tiba menjadi kekuatan “raksasa” dalam peta politik Indonesia. Jika di masa pemerintahan Orde Baru peran eksekutif (Presiden Soeharto) teramat mendominasi (*executive heavy*) dan mutlak dan peran legislative diposisikan sebagai “pelayan” eksekutif, sebaliknya dengan di masa Era Reformasi khususnya di masa-masa awal. Dominasi Legislatif (*Legislatif heavy*) menjadi “raksasa” baru dalam politik Indonesia yang bahkan sampai memakjulkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden pertama dari pemilihan umum nasional tahun 1999. DPR memakjulkan Presiden Gus Dur tahun 2001 yang digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dominasi luar biasa parlemen masih sangat terasa hingga periode akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014.

Tidak hanya di parlemen, isu-isu politik identitas pun menguat di kalangan partai-partai politik dan pemilihan umum. Jika sepanjang masa pemerintahan Orde Baru hanya ada satu azas tunggal yakni Ideologi Pancasila, maka dengan lahirnya era reformasi melahirkan kehendak untuk menunjukkan identitas agama masing-masing, bukan hanya kalangan Islam tetapi juga kalangan Kristen, Katolik, dan kalangan agama lain, karena membayangkan akan mendapatkan dukungan pemilih seperti terjadi di Pemilu tahun 1955 silam.

Politik Identitas Merusak Pemilu Era Reformasi

Isu politik identitas atas nama agama semakin menguat dan mencemaskan mulai pemilu presiden nasional tahun 2014 ketika Presiden incumbent tidak lagi berhak mencalonkan diri sesuai dengan aturan dalam UUD 1945. Dua kubu calon Presiden baru saling berupaya memenangkan pasangan calon presiden baru masing masing, yang sayangnya menjadi salah satu catatan awal lembaran buruk politik identitas di Indonesia.

Setidaknya tiga masa pemilihan umum dengan penggunaan isu buruk politik identitas agama terjadi pada Pilpres 2014, Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019. Tiga masa pemilihan ini memicu ketakutan di kalangan para pemilih yang sampai mempengaruhi psikologis massa pemilih di seluruh tanah air Indonesia. Masyarakat pemilih yang menginginkan kedamaian dan kesantunan berpolitik sangat terganggu dengan proses pemilu yang merendahkan martabat demokrasi. Pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 memang kebetulan hanya mempertemukan dua pasangan calon presiden saja dalam dua kali masa pemilihan presiden itu, yakni Joko “Jokowi” Widodo dan Prabowo Subianto. Sehingga karakter “saling membalas” di kedua masa pemilihan itu yakni di Pemilu 2014 dan di pemilu 2019 tidak bisa terelakkan. Bahkan dalam infomasi media dan hasil kajian sejumlah lembaga terlihat bahwa pemilu presiden 2019 lebih menyeramkan dibanding Pemilu 2014 karena isu-isu politik identitas ditampilkan secara terbuka dan di sejumlah lokasi khususnya di Jakarta terjadi kerusuhan. Pemanfaatan kampanye negative tidak terelakkan di sebut sebut dalam indentas terhadap kubu calon presiden Prabowo Subianto menyebar, sementara kubu calon presiden Jokowi menjadi sasaran tembak dengan isu kampanye hitam.

Politik identitas suku, ras, antargolongan, terutama atas nama agama (SARA) sarat mengotori ruang public selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019. Kubu yang memperjuangkan ideologi nasionalis demokratis berhadapan dengan kubu yang memperjuangkan nilai-nilai Islam yang dikhawatirkan untuk pembentukan ideology negara agama. Padahal isu identitas agama dalam politik Indonesia mestinya sudah berakhir sejak perdebatan Pancasila sebagai ideology sejak tahun 1945 hingga tahun 1957.

Dua provinsi sayap ibukota negara yakni Provinsi Banten di sebelah Barat dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur memberikan kekalahan kepada petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Tahun 2014 dan Tahun 2019. Jokowi kalah karena pencalonannya tidak direstui oleh para alim ulama dan tokoh Islam fanatik di sana.

Selain pemilu Presiden itu, isu politik ideology agama yang buruk terjadi juga di Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Pasaunya, Gubernur DKI petahana yang beragama Kristen, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memenangkan putaran pertama pemilihan gubernur, dan di putaran kedua Ahok diadili habis-habisan. Dipicu oleh ketergelinciran lidahnya atas kesalahan pengucapan terkait isi Kitab Suci Alquran dalam suatu kampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu, Ahok divonis hukuman penjara oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap (*final and binding*) persis saat tahapan pemilihan gubernur masih berlangsung. Tiga pengalaman pahit politik identitas berturut turut tersebut menimbulkan luka batin para pemilih.

Tabel 1: Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

| | Joko Widodo- Mahruf Amin | Prabowo Subianto- Sandiaga Uno | Selisih Suara |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Provinsi DKI Jakarta | 3.279.547 suara (51,68%) | 3.066.137 suara (48,32%) | Joko Widodo unggul: 213.410 suara (3,36%). jumlah sah: 6.345.684 suara, |
| Provinsi Jawa Barat | 10.750.568 suara | 16.077.446 suara | Prabowo unggul: 5.326.878 suara (19,86%) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | (40,07%) | (59,93%). | Jumlah sah: 26.828.014 suara |
| Provinsi Banten | 2.537.524 suara (38,46%) | 4.059.514 suara (61,54%), | Prabowo unggul: 1.521.990 suara (23,07%) Jumlah sah: 6.597.038 suara |

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019)

Data di atas menjelaskan, di Provinsi Banten, Prabowo-Sandiaga mendapat 4.059.514 suara (61,54%) unggul jauh sejumlah 1.521.990 suara (23,07%) dari pasangan Jokowi-Ma'ruf (Kompas, 2019). Sementara di Provinsi Jawa Barat, pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf hanya mendapat 10.750.568 suara (40,07%), Prabowo-Sandiaga unggul 5.326.878 suara (19,86%). Di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya menang tipis dengan meraih 3.279.547 suara (51,68%) dari Prabowo-Sandiaga (www.republika.co.id, 2019).

Politik identitas agama di atas memunculkan dua pertanyaan: *pertama*, apa penyebab menguatnya isu identitas agama dalam politik di Indonesia terakhir ini? *Kedua*, bagaimana nasib para politisi beragama Kristiani saat itu ketika mereka dicalonkan oleh partainya di daerah-daerah berbasis Islam seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, Riau, dan lain-lain?

Makalah ini disusun dengan menampilkan gambaran umum dari traumatic masyarakat atas politik identitas, mengurai alasan kelahiran politik identitas agama yang semakin mengkhawatirkan, kemenangan Prabowo di tiga provinsi utama Indonesia, kiprah para politisi beragama Kristen di Basis Islam. Lalu diakhiri dengan Temuan makalah bahwa politik identitas didukung para alim ulama Islam kelompok garis keras untuk mewujudkan negara berideology Khilafah sebagai catatan serius menuju Pemilu serentak 2024.

Metodologi makalah ini menggunakan penelitian kualitatif yakni data dari literatur-literatur resmi dan wawancara mendalam kepada para pihak yang relevan. Akhir-akhir ini, komunitas ilmiah di Indonesia semakin meminati bidang kajian politik sebagai upaya mencari alternatif dari khazanah budaya sendiri untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan serta keberlakuan konsep-konsep politik yang berasal dari politik Barat (Sulaeman, 2004). Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, otoritas ilmu-ilmu sosial di Indonesia amat mendorong usaha oleh ilmuwan Indonesia mengembangkan konsep-konsep politik dari khazanah kebudayaan Indonesia sendiri (Budiardjo, 1992).

Politik Identitas Mengotori Pemilu 2014 Dan 2019

Politik identitas Pemilu 2019 telah meninggalkan jejak trauma psikologis terhadap masyarakat pemilih dengan korban 4 orang anak meninggal, 172 orang terluka dan 74 ditangkap paksa dalam demonstrasi yang rusuh di kantor Badan Pengawas Pemilu (Tirto, 2019). Dampak psikologis social yang mencekam dari politik identitas terutama atas nama agama telah terjadi sejak Pemilihan Umum 2014 dan berpuncak di Pemilu 2019. Masyarakat minoritas khususnya Nasrani muak dengan Pemilihan Umum karena sangat kental dengan politik identitas agama.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, sejak awal memprediksikan, apabila skenario duel *head to head* calon Presiden 2019 terulang seperti Pemilu 2014, sangat berdampak negatif pada kondisi politik Indonesia. Suasana mencekam sudah terjadi pada Pilpres 2014, di mana Jokowi dan Prabowo juga bertarung. Kontestasi sangat tajam terjadi pada Pemilu 2014 sehingga menimbulkan polarisasi pada masyarakat. Hurriyah menduga ada upaya dari sejumlah pihak untuk terus memelihara kondisi yang terbelah itu (Republika, 2018). Sebab kebanyakan elit politik hanya bertujuan untuk mendapatkan suara masyarakat, tanpa peduli dampaknya masyarakat terpecah belah dan sulit bersatu kembali.

Pemilu 2014 dan 2019 meninggalkan dampak luas yakni politik meningkat, tetapi ekonomi memburuk dan masyarakat sipil stagnan dalam kacamata de-monopolisasi dan

demokrasi (Indeks Demokrasi, 2014). Liberalisasi masih lebih tinggi dibandingkan kesetaraan, sementara indeks demokrasi Indonesia stagnan di kategori 'sedang' dengan skor 5,42 skala 10,00. (Detiknews, 2014). Skor politik tahun 2014 dibandingkan sebelumnya menunjukkan perubahan konstelasi politik hasil Pileg 2014 di mana pemenang Pemilu berganti ke PDIP tetapi tidak ada kekuatan mayoritas di parlemen. Persaingan di Pemilu Presiden menghasilkan polarisasi dua blok politik. Hal ini berdampak pada meningkatnya intensitas diskusi politik di ruang publik, politisasi partisipasi warga dan pendidikan politik (Anugerah, 2014).

Trauma psikologis masyarakat muncul karena maraknya kampanye hitam berlebihan sejak Pemilu Presiden 2014 dengan menggunakan media sosial bagi kedua calon presiden (Litbang Kompas, 2014). Misalnya, masa kampanye pemilu presiden tanggal 4 Juni s/d 5 Juli 2014 menjadi medan "pertempuran" yang panas untuk menghadapi pemungutan suara yang digelar pada 9 Juli 2014. Demi menggagal suara, kampanye hitam ditebar, bahkan sebelum masa kampanye dimulai, hiruk-pikuk untuk menggagal dukungan pemilih sudah terasa.

Pola kampanye hitam dan kampanye negative dengan materi isu suku, agama, dan ras digunakan oleh kedua pendukung calon presiden melalui media sosial dan media massa untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyerang pribadi calon presiden. Materi-materi mengkritisi gagasan, visi-misi, dan program pemerintahan capres malah tidak muncul. Jajak pendapat Litbang Harian KOMPAS 2014 menghadapi fenomena maraknya kampanye hitam membuktikan bahwa hampir 50 persen responden menganggap serangan-serangan kepada pribadi para capres yang dilakukan melalui kampanye hitam sudah berlebihan. Kampanye hitam diharapkan meninggalkan kesan buruk di dalam pikiran rakyat tentang calon pemimpin bangsa sebelum mereka menentukan pilihan.

Materi kampanye yang menyulut kebencian oleh sentimen-sentimen negative mengakibatkan tingkat ketertarikan publik terlibat dalam kampanye pemilihan presiden sangat rendah. Sejumlah dua dari tiga responden mengaku tidak tertarik mengikuti kampanye, bahkan untuk kampanye yang diselenggarakan oleh calon presiden pilihan mereka. Jajak pendapat Harian KOMPAS menunjukkan sejumlah 64,0 persen responden meyakini bahwa kampanye hitam yang kian gencar dilakukan memicu konflik terbuka antar pendukung capres. Majalah jadi-jadian bernama Tabloid OBOR RAKYAT yang hanya muncul saat Pemilu Presiden 2014 merupakan salah satu corong buruk sejumlah pihak tertentu karena selalu menyajikan berita bohong tak berdasar terhadap diri calon Presiden Joko Widodo (Tempo, 2018).

Lebih dari separuh bagian (58,3%) responden khawatir kampanye hitam mengancam persatuan bangsa. Kekhawatiran ini mencuat karena isu-isu yang diangkat dalam kampanye hitam sudah melibatkan sentimen-sentimen kelompok yang berbasis pada rasa primordial dan fanatisme kepada capres. Sentimen primordial yang negatif akan memicu kebencian terhadap kelompok tertentu. Jika kampanye hitam dibiarkan terus tanpa kontrol, efeknya akan panjang dan berdampak pada rusaknya bukan hanya demokrasi Indonesia tetapi juga sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.

Kantor Berita internasional BBC dari Inggris mengemukakan tak hanya soal kampanye kreatif di media sosial, tetapi juga kampanye negatif bahkan kampanye hitam bertebaran yang berupaya menggerus elektabilitas Jokowi dan menguntungkan Prabowo di Pemilu 2014. Menurut *Politicawave*, situs yang menjaring percakapan di media sosial, pasangan Jokowi-JK lebih banyak menjadi sasaran kampanye hitam dengan jumlah persentase sangat tinggi 94,9% dan kampanye negative sejumlah 5,1%. Berbeda bagi pasangan Prabowo-Hatta lebih sedikit dengan kampanye hitam yaitu 13,5%, sementara kampanye negatifnya mencapai 86,5% (Lestari, 2014). Kampanye negatif terhadap Prabowo Subianto selalu isu lama soal HAM, sementara Jokowi banyak mendapatkan sasaran

kampanye hitam bernuansa identitas agama dan suku. Sulit untuk mencari kelemahan Pak Jokowi, sehingga kampanye hitam menjadi upaya satu-satunya untuk mengalahkannya.

Dengan dua calon Presiden yang sama, Pemilu Presiden 2019 malah terasa jauh lebih buruk karena bertindak sangar, menakutkan, dan berlangsung rusuh di ibukota negara selama beberapa minggu. Isu bahwa Presiden Joko Widodo sangat tidak berpihak kepada kepentingan Islam menjadi suara yang paling keras diusung walaupun calon wakil Presiden yang diusung adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu yakni KH Mahruf Amin (Wiwoho 2018).

Mengapa politik identitas agama menguat?

Munculnya politik identitas agama (Islam) karena simbol-simbol keagamaan dipercaya dapat meningkatkan popularitas, serta tingkat penerimaan dengan cara menyentuh sisi emosional umat (Kahmad 2002, Ramlan 2014). Sisi itu dimanfaatkan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk mencapai tujuan ideologi Islam dalam negara. Diduga jumlah pendukung negara agama Khilafah di Indonesia saat ini sudah lebih dari 20 juta orang per Tahun 2017 (SMRC, 2017). Jumlah itu setara dengan 9,2 persen responden yang setuju negara Islam di Indonesia, dan bahkan 11,5% tidak tahu dan tidak mau menjawab. Dan jika kedua tipe responden itu dianggap sama sepikiran maka jumlah tersebut menjadi 20,7% yang menginginkan negara khilafah atau negara Islam di Indonesia. Jumlah tersebut bisa menjadi sangat meningkat sejak Pemilu 2019 yang sangat keras isu identitas agama Islamnya. Tentu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena pembentukan negara Khilafah menolak kehadiran Pancasila.

Ide pembentukan semangat agama Islam dalam negara Indonesia pertama kali diawali dalam perumusan dasar filsafat (*Philosophy Groundslag*) bagi Indonesia pada 31 Mei s/d 1 Juni 1945 dalam rapat Umum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Muh Yamin misalnya dalam paparan pada 29 Mei 1945 sudah menyampaikan ide itu:

“Apabila kita imankan segala ayat Qur’an yang tertuju kepada pemeliharaan negara, maka bolehlah kita dahulukan surat Asjiura ayat 38, yang bunjinya: “Segala urusan mereka dimusyawaratkan”. Perintah ini jelas dan terang. Juga dalam sejarah Rasul Allah dan pada zaman chalifah empat Alchulafaharrijidun, ternjata permusyawaratan bersama itu didjalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala ummat atau wakilnya dapat ikut tjampur dalam penjusunan dan pelaksanaan negara.” (Yamin, 1945)

Ide memasukkan Islam ke dalam ideology negara semakin terlihat dalam Rapat Panitia Sembilan 22 Juni 1945 yang diketuai Soekarno, di dalamnya ada Mohammad Hatta, Agus Salim, Mohammad Yamin, dan Alex Andreas Maramis seorang beragama Kristiani, menyepakati lahirnya Piagam Djakarta sehingga Sila Pertama Pancasila selengkapnya berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Alasannya karena jumlah penduduk beragama Islam sejak dulu hingga saat ini selalu mendekati angka 90% dari persentase seluruh penduduk Indonesia.

Piagam Djakarta ditolak pada 18 Agustus 1945 setelah Alex Andreas Maramis, seorang Nasrani, menyatakan keberatannya. Sila Pertama Pancasila di Piagam Jakarta dicoret 7 (tujuh) kata sehingga hanya berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perdebatan ideologi paling seru terakhir terjadi dalam waktu yang panjang (November 1956 s/d 5 Juli 1959) di masa Sidang Konstituante antara blok Islam versus blok Nasionalis saat menyusun revisi UUD 1945. Sidang Konstituante berakhir gagal dan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1957 untuk kembali ke UUD 1945 awal (www.konstitutante, 2020).

Sejumlah pemberontakan untuk membentuk negara Islam Indonesia dengan pemerintahan ke-Khilafahan Islam, Darul Islam, dan Islamisme pernah terjadi, antara lain: Darul Islam (rumah Islam) DI/TII pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, pemberontakan oleh Daud Beureueh di Provinsi Aceh (1953-1962), pemberontakan Amir Fatah di Provinsi Jawa Tengah (1950-1959), dan pemberontakan Kahar Muzakkar di Provinsi Sulawesi Selatan (1950-1965). Pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dengan sistem pemerintahannya yang otoriter tidak mengalami pemberontakan untuk Negara Islam Indonesia karena Presiden Soeharto bertindak sangat tegas dan keras.

Mengapa isu identitas agama Islam menjadi sangat kuat dan mengkhawatirkan di pemilu Tahun 2014 dan 2019? Fakta awalnya dipicu oleh kehadiran Jokowi sebagai Walikota Solo Jawa Tengah menjadi Gubernur DKI Jakarta mengusung wakil Basuki Tjahja Purnama (Ahok), seorang Nasrani dan Tionghoa, Tahun 2012. Keduanya dicalonkan oleh PDI Perjuangan (dipimpin Megawati Soekarnoputri) dan Partai Gerindra (dipimpin Prabowo Subianto). Untuk pertama kalinya ada wakil gubernur beragama Kristiani di Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan tahun 2012-2017.

Sikap fenomenal Jokowi dengan praktek "blusukan" membuatnya dikenal public ke seantero tanah air. Tahun 2014, Jokowi dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon Presiden Republik Indonesia berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang mengusungnya di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, yakni Prabowo Subianto. Sejak saat itu Jokowi dicap beretika politik buruk karena tidak bertanggungjawab menyelesaikan jabatan gubernurnya tahun 2012-2017. Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh untuk masa jabatan tahun 2014-2019.

Ahok seorang Nasrani dan Tionghoa, yang sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra setelah terpilih sebagai wakil gubernur, otomatis menjadi gubernur DKI Jakarta. Kebencian terhadap Ahok memuncak karena dianggap bersikap politik buruk, menabrak etika, dan moral politik masyarakat Timur, dan tentu saja tidak bisa dipisahkan dari suku dan agama minoritasnya. Masyarakat pendukung Partai Gerindra dan pendukung Islam fanatik dan partai sejenis menggalang penolakan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islam garis keras, yang pernah mendulang suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta, sangat tidak menginginkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Perolehan suara PKS selalu signifikan sebagai pemenang kedua atau ketiga dalam pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 (www.kpuri, 2020).

Tak terelakkan, isu identitas agama yang sudah membara di Pilpres 2014, semakin membara lagi di putaran kedua proses Pemilihan Gubernur DKI 2017 ketika Ahok versus Anis Baswedan. Ahok dimajukan ke pengadilan atas tuduhan penistaan terhadap isi Alquran saat berkampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu. Lebih dari sejuta umat Muslim pada Jumat 2 Desember 2016 turun ke jalanan Jakarta menolak meminta Ahok untuk dimasukkan ke pengadilan untuk dipenjarakan. Ahok dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang melahirkan suatu gerakan sosial Islam dalam rangka mengawal proses hukum dalam kasus penistaan agama (Fuqoha-Sukendar, 2018).

Gerakan Aksi 212 sebagai aksi bela Islam sangat menentukan pilihan ummat terhadap Pemilihan kepala daerah, legislative, hingga presiden (Bonasir, 2018). Perilaku kolektif gerakan sosial Islam disebabkan adanya aspirasi diantara umat Islam yang memerlukan gerakan agresif-progresif karena organisasi Islam selama ini cenderung bergerak secara konvensional (Mustofa, 2018). Partai-partai politik Islam sibuk dengan problem kepentingan internalnya. Terhadap pemerintah, aspirasi umat Islam sepertinya diabaikan sehingga umat Islam perlu menemukan jawabannya sendiri (Sembiring, 2018).

Terhadap Pemilihan Presiden 2019, Gerakan 212 sosial politik Islam menghasilkan Ijtima Ulama Alumni 212, sebuah rekomendasi untuk umat dan partai bahwa calon presiden

2019 adalah Prabowo-Salim Segaf atau Prabowo-Ustadz Abdul Somad. Dalam Pemilihan Presiden 2019, citra dan identitas buruk religius ditempelkan pada kedua calon presiden antara: partai Allah dan partai Setan. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Amien Rais, menyuarakannya dengan sangat vokal gerakan #2019GantiPresiden yang ditujukan kepada petahana Presiden Jokowi dengan terminologi baru: Partai Allah dan partai Setan (Kurniawan, 2018).

Berikut kutipan pernyataan Amien Rais (www.cnnindonesia, 2018):

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan hizbusy syaithan, Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan.”

Dalam Pemilu Presiden 2019, Rizieg Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyebarkan dikotomi Poros Mekkah dengan Poros Beijing. Istilah Mekkah dan Beijing memiliki konotasi dan stigma berdaya diskriminatif. Terminologi Poros Mekkah menyiratkan makna kubu yang Islamis, religius, dan visi perubahan (Koning, 2018). Terminologi Poros Beijing berstigma bagi yang selama ini sentimen “China” untuk pendukung Presiden Jokowi. Sentimen anti-China sangat panas saat kasus pidana Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang dipenjarakan (Friana 2017, Kresna 2017).

Dampaknya dalam Pilpres 2019, Prabowo meraih kemenangan telak di daerah-daerah pangkalan Darul Islam yang pernah berjuang mewujudkan negara berdasarkan syariah Islam. Ada stigma pemilih bahwa Prabowo sebagai kelompok garis keras, radikal, dan anti-toleransi. Prabowo mendominasi suara di pulau Sumatra, terutama Sumatera Barat dan Aceh dengan masing-masing 85,03 persen dan 83,11 persen. Di Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Prabowo masing-masing meraih 62,56 persen, 59,98 persen, dan 58,48 persen suara.

Lalu bagaimana para politisi Kristen menyikapinya ketika mereka harus ditempatkan di daerah pemilihan berbasis Islam?

Nasib Politisi Kristen Di Basis Islam

Bagaimana nasib para politisi Kristen di tengah situasi politik identitas agama Islam yang sangat memanas sepanjang Pemilu 2014, 2017 dan 2019 tersebut terutama bagi mereka yang menjadi calon di basis-basis Islam yang kuat seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau? Dan bagaimana nasib mereka dalam Pemilihan tahun 2024 mendatang? Dalam dua kali Pemilihan Umum Legislative (2014 dan 2019) di Indonesia, jumlah kursi dari anggota legislatif beragama Kristen justru meraih kursi secara signifikan. Provinsi Jawa Barat selalu memberi kursi legislative beragama Kristen yang cukup signifikan.

Tabel 2: Daftar Provinsi berbasis Islam Legislatif Kristen Pemilu 2014

| PROVINSI | PARTAI POLITIK | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | PDIP | Demokrat | Gerindra | Golkar | Nasdem | |
| Jawa Barat | 6 | - | - | - | - | 6 kursi |
| DKI Jakarta | 5 | - | - | - | - | 5 kursi |
| Jawa Timur | 4 | - | 1 | - | - | 5 kursi |
| Sumut | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 kursi |
| Riau | 2 | - | - | - | - | 2 kursi |
| Jateng | 2 | - | 2 | - | - | 4 kursi |
| TOTAL | 21 kursi | 2 kursi | 5 kursi | 1 kursi | 1 kursi | 30 kursi |

Jika melihat Pemilu Legislatif 2014 di atas, kursi terbesar PDI Perjuangan sebagai partai yang bukan berbasis agama lebih banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yakni sejumlah 6 kursi, berturut-turut 5 kursi dari DKI dan 4 kursi dari Jawa Timur. Tabel 2 dan Tabel 3 menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kaum nasionalis selalu menjadi partai politik penyumbang kursi bagi anggota legislative beragama Kristen setidaknya di 6 (enam) provinsi yang berbasis Islam atau setidaknya mayoritas dominan berpenduduk agama Islam.

Table 3: Daftar Provinsi berbasis Islam Legislatif Kristen Pemilu 2019

| PROVINSI | PARTAI POLITIK | | | | | Jumlah |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | PDIP | Demokrat | Gerindra | Golkar | Nasdem | |
| Sumut | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 9 kursi |
| Dki | 7 | - | - | 1 | - | 8 kursi |
| Jateng | 6 | - | 1 | - | - | 7 kursi |
| Jabar | 4 | - | - | - | - | 4 kursi |
| Jatim | 3 | - | 1 | - | - | 4 kursi |
| Riau | 2 | - | - | - | - | 2 kursi |
| Total | 27 kursi | 2 kursi | 2 kursi | 2 kursi | 1 kursi | 34 kursi |

Dalam Pemilu Legislatif 2019, PDI Perjuangan tetap menjadi penyumbang kursi terbesar yang jumlahnya lebih besar dari Pileg 2014 sejumlah 21 kursi menjadi 27 kursi. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang kursi terbesar sejumlah 9 kursi mengalahkan Provinsi Jawa Barat di Pileg 2014 sejumlah 6 kursi, menyusul Provinsi DKI dengan 8 kursi. Jika dilakukan perbandingan antara peran dan pelibatan tokoh-tokoh Kristen masa lalu dan tokoh-tokoh Kristen masa kini di Indonesia, ada anggapan kuat bahwa peran dan pelibatan orang Kristen secara politik lebih nyata, cukup kuat, dan relatif berpengaruh di masa lalu dibandingkan masa kini (Silalahi, 2009).

Padahal dari segi persentase, jumlah penduduk beragama Kristiani (baik Protestan maupun Katolik) hanya sedikit, tetapi secara politik memiliki pengakuan yang setara dengan penduduk yang beragama mayoritas Islam. Bentuk kesetaraan dalam demokrasi yang dewasa. (Dahl, 2001). Berikut ini ditunjukkan Persentase Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (BPS, 2008):

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Islam | : 192.932.919 jiwa (88,8%) |
| - Kristen Protestan | : 12.395.753 jiwa (5,7%) |
| - Kristen Katolik | : 6.563.199 jiwa (3,0%) |
| - Hindu | : 3.698.282 jiwa (1,7%) |
| - Buddha | : 1.306.248 jiwa (0,6%) |
| - Khonghucu | : 205.808 jiwa (0,1%) |
| - Lain-lainnya | : 243.931 jiwa (0,1%) |

=====
Total 217.346.140 jiwa (100%)

Total jumlah penduduk beragama Kristen (Katolik dan Protestan) adalah 18.958.952 jiwa atau (8,7%). Maka mestinya umat Kristen mendapatkan kursi sebesar 8,71% dari suara yang diperebutkan di setiap Pemilu. Bagaimana hasilnya di Pemilu Legislatif?

Tabel 4: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019

| Pemilu 2019 | Nama Partai | Jlh Kursi | % Kursi | Keterangan |
|-------------|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| Partai | - | - | - | Total: 575 kursi (100%) |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| Kristen | | | | |
| Partai Non Kristen | PDI Perjuangan | 48 | 8,35% | Perbandingan: - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen di DPR: 14,43% - Selisih: 5,72 % |
| | NASDEM | 12 | 2,09% | |
| | GOLKAR | 8 | 1,39% | |
| | GERINDRA | 6 | 1,04% | |
| | DEMOKRAT | 5 | 2,36% | |
| | PAN | 2 | 0,35% | |
| PKB | 2 | 0,35% | | |
| TOTAL | | 83 kursi | 14,43 % | |

Data Table-4 menunjukkan bahwa persentase perolehan kursi yang diraih oleh para anggota legislatif Kristen meningkat dari 12,5% tahun 2014 menjadi 14,43% di Pemilu Legislatif 2019. Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan menjadi partai yang mendominasi perolehan kursi anggota legislative beragama Kristen yakni 48 kursi (8,35%). Perolehan ini meningkat tajam dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya 35 kursi (6,25%). Partai Nasdem melonjak tajam memperoleh 12 kursi (2,09%) di peringkat kedua di bawah PDI Perjuangan dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya memperoleh 3 kursi (0,54%).

Patut diperhatikan dua partai berbasis Islam moderat pada Pileg 2019 memberikan 4 kursi sekaligus (0,70%) yang dihasilkan dari dua partai yakni PAN dan PKB yang masing-masing menyumbangkan 2 kursi. Artinya, para anggota legislative Kristen juga berasal dari partai-partai berbasis agama Islam.

Tabel 5: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014

| Pemilu 2014 | Nama Partai | Jlh Kursi | % Kursi | Keterangan |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| Partai Kristen | - | - | - | Total: 560 kursi (100%) Kursi Kristen: 11,96% |
| Partai Non Kristen | PDI Perjuangan | 35 | 6,25% | Perbandingan: - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen DPR: 12,50% - Selisih: 3,79% |
| | DEMOKRAT | 11 | 1,96% | |
| | GERINDRA | 11 | 1,96% | |
| | GOLKAR | 7 | 1,25% | |
| | NASDEM | 3 | 0,54% | |
| | HANURA | 3 | 0,54% | |
| TOTAL | | 70 kursi | 12,50 % | |

Data di atas menunjukkan perolehan kursi terbesar para caleg beragama Kristen melalui PDI Perjuangan yakni 35 kursi. Di peringkat kedua ada Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, calon Presiden 2014 dan 2019 yang didukung oleh para ulama Islam khususnya di Jawa Barat.

Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen

Di tengah isu politik identitas yang sangat panas 2014 dan 2019, apa yang membuat para pemilih Muslim menjatuhkan pilihan demokrasi pada politisi beragama Kristen? Kami mewawancarai mendalam sejumlah pemilih beragama Islam. Mereka adalah Abah Abidin (73 tahun) Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi dan Haji Didi Supriadi (56 tahun) penduduk Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusanagara, Pamanukan-Subang.

Kesimpulan sederhananya adalah karena kedua pemilih Muslim tersebut terpesona dengan sikap tulus dan baik caleg Kristen karena janjinya dapat dipercaya, mereka bertindak sebelum berbicara, sedikit berbicara tetapi banyak berbuat untuk kepentingan rakyat. Sikap jujur dan tidak berjanji muluk-muluk, dan selalu hadir di tengah persoalan masyarakat. Maka

benar kata Alan Ware bahwa jika potensi individu sudah layak dijual ke pemilih dan mampu menaikkan suara partai politik, maka peranan partai tidak lagi dominan (Ware, 1994).

Argumentasi pemilih Muslim dapat dikategorikan dalam lima alasan, yakni: *pertama*, kemampuan caleg bersangkutan bersikap santun dan mampu mengambil hati warga dalam nuansa tata krama agama dan budaya setempat; *kedua*, karena caleg yang bersangkutan adalah bahagian dari korban Orde Baru karena terkait dengan PKI sehingga menggalang dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba); *ketiga*, kerelaan caleg Kristen untuk memberikan pengobatan gratis terbuka kepada seluruh warga yang kontinu setiap bulan tidak terikat hanya seat Pemilu; *keempat*, pendekatan pembangunan fisik sarana umum seperti mesjid, air minum, jalan raya; *kelima*, kemampuan melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh local khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan gerbong partai.

Tentu saja teori Affan Gaffar bahwa politik aliran masih sangat kuat di Indonesia sebagai preferensi pilihan bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat diterima. Dari analisis penelitiannya di daerah Brobanti, Yogyakarta, Affan Gaffar memperkuat teori bahwa ada hubungan yang sangat dekat diantara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Buktinya pemilih Muslim tetap menjatuhkan pilihan politik kepada para caleg Kristen walaupun politik identities sangat kotor terjadi di masa Pemilu yang sama.

Ribka Tjiptaning seorang anggota legislative perempuan beragama Kristiani hasil Pemilu 2014 dan 2019 di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat dicintai dan dipilih warga beragama Muslim justru ketika Ribka secara terbuka mengaku diri sebagai keturunan dari pengikut Partai Komunis tahun 1955. Ikatan emosionalitas yang sangat tepat seperti digambarkan oleh Clifford Geertz bahwa aspek politik ketika sudah berbaur dengan aspek primordialisme menjadi sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. Penduduk Desa Cicolawing sudah terikat secara primordial sangat kuat terhadap Ribka persis seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz. Padahal di Desa Cicolawing Kecamatan Pawenang itu sekitar 99,99% beragama Muslim yang memenangkan Ribka Tjiptaning.

Apakah pengalaman serupa ini masih akan terjadi dalam Pemilihan nasional serentak tahun 2024 yang diperkirakan akan membawa politik identitas agama (Islam) yang akan semakin terang benderang untuk upaya mendirikan negara Khilafah Islam?

Refleksi: Menuju Pemilihan Nasional 2024

Pengalaman politik dengan penjonjolan isu identitas agama (Islam) dalam Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019 menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024. Apalagi dalam Pemilu tahun 2004, Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sehingga sangat dikhawatirkan pemenang pilpres adalah calon presiden yang diusung oleh pihak pendukung negara Khilafah. Jika itu terjadi maka nasib kalangan minoritas akan semakin terancam, dan bibit demokrasi, yang menghormati martabat manusia walau berbeda suku dan agamanya, akan semakin sulit bertumbuh sehat di Indonesia.

Usulan makalah ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut ke sejumlah wilayah lain untuk memperkuat apakah sesungguhnya politik identitas sedang bertumbuh di Indonesia? Misalnya apakah ada kandidat beragama Muslim justru menang di basis-basis beragama Kristiani. Studi-studi demokrasi yang lebih luas dibutuhkan termasuk mencari tahu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke Pemilu 2024 nanti dan ke depannya setelah politik identitas yang sangat buruk di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu.****

DAFTAR RUJUKAN**Buku-buku:**

- Almond, Gabriel A., "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik", dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (eds.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
- _____, Gabriel A. dan G. Bigham Powell, Jr., *Comparative Politics, System, Process and Policy*, second edition, Boston: Little, Brown and Company, 1978
- Anderson, Benedict dan Audrey Kahin (eds), *Interpreting Indonesia Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York, 1982.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- _____, Miriam (peny.), *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1984.
- Burns, Edward McNall, et al. *Western Civilization: Their History and Their Culture*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- _____, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1989
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1962.
- Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019" dalam *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018)
- Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019" dalam *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (I)*, Penerbit "Bulan Bintang", Jakarta, 1952.
- _____, Mohammad, "Pendjadjahan dan Soal Bangsa", *Daulat Ra'jat* No. 11, 30 Desember 1931.
- _____, Mohammad, "Indonesia Dalam Perhoebongan Doenia", *Daulat Ra'jat* No. 40, 20 Oktober 1932.
- _____, Mohammad, "Collectivisme Toea dan Baroe", *Daulat Ra'yat* No. 75, 10 Oktober 1933.
- Hasil Penelitian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014 oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, dipublikasikan di Pasca Sarjana UI, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 — 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, [tanpa tahun]).
- Huntington, Samuel P., "Democracy's Third Wave", dalam Bernard E. Brown dan Roy C. Macridis, eds., *Comparative Politics: Notes and Readings*, 8th edition, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- Kahin, George McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Ismail bin Muhammad B.A. (Hons), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980.

- Kahin, Audrey, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
- _____, Audrey R., *West Sumatra: Outpost of the Republic, dalam Audrey R. Kahin (ed.), Regional Dynamics of the Indonesia Revolution: Unity from Diversity*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985.
- Khan, Rais A., James D. McNiven dan Stuart A. MacKown, *An Introduction to Political Science*, revised edition, Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited, 1977.
- Laffan, Michael. *Sejarah Islam di Nusantara* (terjemahan oleh Indi Aunullah) (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2015).
- Leeds, C. A., *Political Studies*, 2 nd edition, London: MacDonnald & Evans, Ltd., 1975.
- Magnis-Suseno SJ, Franz, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- _____, Franz, “Cita-Cita Kenegaraan Bung Hatta”, makalah dalam seminar nasional tentang Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta, Arsip Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Mazour, Anatole G. dan John M. Peoples, *Men and Nations; A World History*, 3rd edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
- Meyer, . Thomas, *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2005.
- Panji Anugerah. *Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014.
- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Rauf, Maswadi, “Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara Penentuan Kebijakan Politik dalam Pembangunan Politik di Indonesia”, dalam Amir Santoso (ed.).
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Silalahi, Harry Tjan. “Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan”, dalam *Panggilan Membangun Bangsa dan Negara. Dasar Pedoman dan Arah Keterlibatan Politik Kristen*. Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009.
- Sulaeman. *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009).
- Surjo, dkk., Djoko, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara, UGM, 2001.
- Zainuddin, A. R. *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2004).

Jurnal, Koran, Majalah:

- “17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang disetujui Prabowo” (Laporan dan Kajian Tempo) dalam www.tempo.co, Minggu 16 September 2018.
- “Amien Rais Dikotomikan Partai Setan Dan Partai Allah”, dalam *Laporan CNN* di www.cnnindonesia.com pada Jumat 13 April 2018.
- “PDIP Menunggu manuver Amiern Rais soal Ganti Presiden 2019”, dalam www.tempo.co pada Minggu 10 Juni 2018.

- “Pemilu 2019: Darul Islam Bayangi Bangkitnya Politik Islam di Indonesia” dalam <https://www.matamatapolitik.com> on May 2, 2019 at 2:51 PM.
- Azra, Azyumardi. “Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society” dalam *Heritage of Nusantara*, vol. 4, no. 1, 2015.
- Azra, Azyumardi. “Network of Ulama in the Haramayn: Connection in the Indian Ocean Region” dalam *Studia Islamika*, vol. 8, no. 2, 2001.
- Badrun, “Gerakan Aksi persaudaraan Islam” dalam www.republika.co.id pada 10 Oktober 2018.
- Budi Kurniawan, “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi” dalam *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret* Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-4457 hal 143-144.
- Budiardjo, Miriam, ‘Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik’, *Jurnal Ilmu Politik* No. 1, 1986.
- Crouch, Harold, “Democratic Prospects in Indonesia”, *Asian Journal of Political Science*, Vol. 1, No. 2, Desember 1993.
- Fuqoha, F. et.al, “Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia” dalam <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id>, Tahun 2018.
- Imaduddin Muhammad, Wildan. “Ormas Islam di Jawa Barat dan Pergerakannya: Studi Kasus Persis dan PUI”, dalam *ANALISIS, Volume XVI, Nomor 2, Desember 2016 jurnal Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kurniawan, Budi. “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi” dalam *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret* Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-4457.
- Lestari, Sri (wartawan BBC). *Pertarungan pilpres sengit di media social*, BBC Indonesia, pada 5 Juli 2014.
- Madjid, Nurcholis, “Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2002.
- Miriam Budiardjo, “Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 1, 1986.
- Muhsin Z., Mumuh. “Penyebaran Islam Di Jawa Barat, makalah yang disampaikan dalam *Saresehan Nasional “Sejarah Perjuangan Syaikhuna Badruzzaman (1898 – 1972) n* pada tanggal 13 Juni 2010 di Pondok Pesantren al-Falah, Mekargalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat.
- R. Antares P, “Perjalanan Ijtima Ulama 1 sampai Ijtima Ulama 3”, dalam www.tagar.id . pada 3 Mei 2019.

Website, News:

- www.tirto.id, 23 Juli 2019.
- www.bbc.com, 10 Oktober 2018.
- www.bbc.com/indonesia, 21 Februari 2017.
- www.detiknews.com, 12 Des 2014.
- www.kompas.com, 9 Juni 2014.
- www.kompas.com, 15 dan 17 Mei 2019.
- www.konstituante.net, 10 Agustus 2020.
- www.kpu.go.id, 26 November 2019.
- www.kumparan.com, 10 Juni 2018.

www.pilpres.tempo.co, 15 Desember 2018

www.republika.co.id, 3 Mei 2018.

www.republika.co.id, 13 Mei 2019.

www.sindonews.com, 10 Oktober 2018).

www.wikipedia.com, 10 Agustus 2020.